

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Desa telah diberikan kepercayaan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri. Dengan otonomi tersebut diharapkan terjadi pemerataan pelaksanaan pembangunan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya dapat diminimalisir. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDes:

1. Masyarakat desa Baudaok belum terlalu memahami pentingnya partisipasi dan pengawasan masyarakat terkait pengelolaan anggaran desa. Oleh karena itu perlu sosialisasi lebih luas pada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan anggaran desa
2. Tidak semua aparat Desa Baudaok memahami tentang pengelolaan anggaran desa sehingga terjadi penumpukkan pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang saja.
3. Dengan adanya perubahan Regulasi APBDes pada tahun 2020 membuat pemerintah Desa Baudaok harus lebih bekerja keras untuk penetapan APBDes.
4. Di Desa Baudaok Sumberdaya Manusia (SDM) lebih didasarkan pada pengalaman, akan tetapi pengalaman lamanya bekerja belum tentu

menjadikan perangkat desa dapat mengikuti perubahan-perubahan terhadap pengelolaan anggaran dan teknologi informasi yang ada.

5. Latar Belakang pengelolaan anggaran desa mayoritas adalah SMA dan SD sehingga realisasi antara kesiapan pemerintah desa dan pengelolaan anggaran desa dengan latar belakang Pendidikan sangat berpengaruh.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan pelatihan-pelatihan kepada Aparat Desa Baudaok guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang saja.
2. Pemerintah desa Baudaok perlu melakukan sosialisasi ke pada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa.
3. Pemerintah Desa Baudaok perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang Teknologi Informasi, dan Akuntansi, serta pemerintah desa juga perlu mengikuti pelatihan secara kontinyu dan merata, kemudian dilakukan evaluasi kinerja perangkat desa untuk mengetahui sejauh mana perangkat desa menerapkan ilmu yang didapat dalam pelatihan yang diikuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, dan Bambang Jatmiko.2015, *Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yang Trasnparan dan Akuntabel (survey pada perangkat desa di Kecamatan Ngangklik, Slemen)*, Yogyakarta: Jurnal Universitas Muhamadiyah
- Arcanca, Ria. 2019. *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang Tahun 2017)*, Kupang : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Aunsuni,Natalia, Gradiana, 2019. *Analisis faktor penyebab keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Tuapukan kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang*, Kupang : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Irvan Wayan.2017, *Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*, Lampung: Universitas Lampung
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta : Erlangga
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Puspawardani Wida.2014, *Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*, Bandung: Universitas Galuh
- Sari,Wella, Permata. 2019. *Analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri No 113 tahun 2014 pada Desa Tanjung Ali Sukadarma dan Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi kabupaten Ogan Komering Ilir*, Palembang : Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sugiyono.2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta
- Sujarweni V. Wiratna.2016, *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Zalukhu,Rinda, Nofotna. 2020. *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lauru 1 Afulu kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara*, Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.